



**PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR 08 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2020**

**DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



HUKUM TUA DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESAWIAU LAPI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Hukum Tua;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Hukum Tua tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) WIAU LAPI Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Desa WIAU LAPINomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
dan
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WIAU LAPI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa WIAU LAPI Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang
 2. Dasar Hukum
 3. Tujuan dan Manfaat
 4. Visi – Misi Desa
 5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
 1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2019;

2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
4. pelaksana kegiatan Desa

d. BABIV : PENUTUP

- LAMPIRAN : 1. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa Tahun anggaran 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Hukum Tua.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa WIAU LAPI
Pada Tanggal September 2019

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

ALFRITS F. ASENG, SP





NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2020

DESA : **WIAU LAPI**
KECAMATAN : **TARERAN**
KABUPATEN : **MINAHASA SELATAN**

DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
 2. Dasar Hukum
 3. Tujuan dan Manfaat
 4. Visi – Misi Desa
 5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2020;
 2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 4. pelaksana kegiatan Desa
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2020
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa berhak melaksanakan kegiatan pembangunan diwilayahnya. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJMDes dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam Dokumen RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam.

Keberadaan kedua dokumen tersebut wajib adanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena kedua dokumen tersebut adalah merupakan dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Desa WIAU LAPI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

C. Tujuan Dan Manfaat

- a. Sebagai dasar dalam penyusunan APBDes,
- b. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun,
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
- e. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
- f. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

D. Visi Dan Misi

Visi : “menuju pemerintahan dan masyarakat desa WIAU LAPI yang beriman, bersatu, rukun, mandiri dan sejahtera”.

- Misi** :
1. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa WIAU LAPI yang takut akan tuhan berdasarkan pancasila dan uud 1945.
 2. Memaksimalkan pemerintahan desa/ aparat desa yang jujur, adil, berwibawa, berkreasi serta berdedikasi tinggi dalam pembangunan desa.
 3. Menciptakan kerja sama pemerintah desa dengan semua golongan gereja yang ada serta meningkatkan kerja sama dengan seluruh

lembaga yang ada di desa.

4. Berupaya untuk melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan sarana perekonomian masyarakat.
5. Mensosialisasikan secara transparan segala bantuan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat kepada masyarakat.
6. Mengajak generasi muda (pemuda, mahasiswa) untuk berkarya dan menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan iptek tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan desa.

E. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD;
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari 7 orang;
3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. penyusunan rancangan RKP Desa;
6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. penetapan RKP Desa;
8. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa WIAU LAPI disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Restribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.001.409.000,- (Satu Milyard lima puluh Sembilan juta empat ratus empat belas ribu) yang berasal dari :

| NO | PENDAPATAN | PERKIRAAN PENDAPATAN |
|-----------|--|---------------------------------|
| 1.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,- |
| 1.2. | Dana Desa dari APBN | 787.474.000,- |
| 1.3. | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten | 0,- |
| 1.4. | Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten | 0,- |
| 1.5. | Bantuan Pemerintah Kabupaten | 0,- |
| 1.6. | Bantuan Pemerintah Propinsi | 0,- |
| 1.7. | Bantuan Pemerintah Pusat | 0,- |
| 1.8. | Alokasi Dana Desa | 300.270.000,- |
| 1.9. | Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa | 0,- |
| | Sumber Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat | 500.000,- |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| JUMLAH PENDAPATAN: | 1.088.244.000 |
|---------------------------|----------------------|

Asumsi Pendapatan Desa tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan Desa tahun 2020 sehingga nominalnya sama dengan tahun yang lalu dan dana desa dari bantuan Pemerintah Propinsi dan Pusatserta bagi hasil pajak belum dapat dimasukkan karena pagu indikatif belum diterima ketika penyusunan RKP Desa ini.

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Hibah.
- c. Belanja Bantuan Sosial;
- d. Belanja Bantuan Keuangan;
- e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa WIAU LAPI sebesar Rp.1.088.244.000,- (*satu milyar delapan puluh delapan jutadua ratus empat puluh empat ribu rupiah*), dengan komposisi, sebagai berikut :

| NO | BELANJA | PERKIRAAN BELANJA |
|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 2.1. | BELANJA LANGSUNG | 947.214.909,- |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai / Honorarium | 43.754.400,- |
| 2.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 257.670.009,- |
| 2.1.3. | Belanja Modal | 646.290.500- |
| | <i>Jumlah 2.1:</i> | |
| 2.2. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 157.000.000,- |

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2.2.1. | Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap | 156.600.000 ,- |
| 2.2.2. | Belanja Hibah | 0,- |
| 2.2.3. | Belanja Bantuan Sosial | 0,- |
| 2.2.4. | Belanja Bantuan Keuangan | 0,- |
| 2.2.5. | Belanja Tak terduga | 500.000,- |
| | <i>Jumlah 2.2:</i> | |
| | JUMLAH BELANJA (2.1. + 2.2.) : | 1.104.314.909- |

C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa WIAU LAPI belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan informasi Pagu Indikatif Penerimaan Desa dan RPJM Daerah Kabupaten dan Propinsi belum diterima oleh desa.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;Rp..47.146.800
- b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- c. Penerimaan Pinjaman; dan
- d. Pencairan Dana Cadangan;

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa;

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2019

Dalam RKP Desa Tahun 2019, permasalahan Desa WIAU LAPI dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa pada tahun 2019 anggarannya bersumber dari ADD dengan jumlah anggaran Rp. 289.560.000,- terdiri dari Siltap Hukum Tua dan Perangkat, tunjangan Bendahara Desa, PTPKD,BPD dan Operasional Pemerintah dan BPD, Insentif Linmas.

2. Bidang Pembangunan Desa

Berdasarkan kegiatan pembangunan desa dari pada tahun 2019 ada 4 kegiatan yang terdani melalui dana desa yaitu :

- Pekerjaan pengerasan Jalan Desa Rp. 303.390.000,-
- Pembangunan / Peningkatan / pengerasan jalan usaha perluasan pemukiman dengan jumlah anggaran Rp.263.344.500,-
- Pembangunan / peningkatan Talud Penahan Tanah dengan jumlah anggaran Rp. 64.206.000
- Pembuatan Batas desa Rp. 11.000.000

Yang belum terlaksana dalam RKP 2019 seperti :

- Perintisan jalan kebun dan jalan perluasan pemukiman
- Pembangunan rabat beton jalan perekonomian menuju kebun kapaya
- Perkerasan Jalan untuk perluasan pemukiman di bagian Selatan Desa dan bagian Timur Desa
- Paving Jalan Selatan Desa
- Pembangunan Talud Lapangan
- Pembangunan Paving jalan lapangan Desa
- Pembangunan Lapangan Desa
- Telford Jalan Lapangan

Akan dimasukkan dalam RKP Tahun 2020

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan belum terlaksana, karena terkendala dengan anggaran yang tidak tersedia, karena sesuai Permendesa Nomor 5 tahun 2015, dana desa hanya dapat digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Yang terlaksana adalah :

- Kegiatan peningkatan Kapasitas Hukum Tua dengan anggaran Rp. 14.000.000,-

- Pelatihan BPD dengan anggaran Rp.9.000.000.-
- Kegiatan pelatihan Karang Taruna dengan anggaran Rp. 5.000.000.-
- Kegiatan pelatihan Perangkat Desa Penataan Aset Desa dengan anggaran Rp.28.800.000.-
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Design Dan Rab Rp. 7.097.000,-
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDes Rp. 5.675.000.-
- Peninkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Rp. 8.472.500,-
- Pelatihan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp. 7.370.000
- Pemberian makanan tambahan Rp. 12.000.000
- Pengembangan Bantuan Hukum dan paralegal desa Rp. 13.405.000

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun 2020;

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang didanai melalui pagu indikatif Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

| I. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|-----------|--|
| 1 | Pendataan kependudukan / Pembuatan Monografi Desa |
| 2 | Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan; |
| 3 | Kegiatan Musyawarah Desa; |
| 4 | Kegiatan Musrenbangdes; |
| 5 | Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa; |
| 6 | Penyusunan APBDesa; |
| 7 | Penyusunan Perubahan APBDesa; |
| 8 | Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ |
| 9 | Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa; |
| 10 | Sewa Pinjam Pakai Kantor Desa; |
| 11 | Rehabilitasi sedang/berat balai desa; |
| 12 | Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa |

| | |
|------------|---|
| 13 | Kegiatan Operasional BPD; |
| 14 | Kegiatan Operasional Jaga; |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik; |
| 16 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa; |
| 17 | Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa; |
| 18 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas; |
| 19 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan; |
| 20 | Penyediaan Makanan dan Minuman; |
| 21 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa; |
| 22 | Tunjangan Hukum Tua ,Perangkat Desa, PTPKD, Bendahara Desa dan BPD, |
| 23 | Insentif linmas |
| 23 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah; |
| 24 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; |
| 25 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;(LCD, Computer, Printer) |
| 26 | Pengadaan sound system serta alat penguat suara |
| 27 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; |
| 28 | Pengadaan pakaian kerja lapangan; |
| 29 | Pengadaan pakaian batik; |
| 30 | Pengadaan pakaian Olah Raga |
| 31 | Pemilihan Hukum Tua |
| 32 | Premi Asuransi |
| 33 | Operator Siskeudes |
| 34 | Alat alat Kebersihan Kantor |
| 35 | Pengadaan mebeleur |
| 36 | Insentif Kader |
| | |
| II. | Bidang Pembangunan Desa |
| 1 | Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu |
| 2 | Pembangunan paving stone / Rabat jalan lingkar lapangan desa |
| 3 | Pembangunan lapangan Desa |
| 4 | Perintisan / Perkerasan jalan perekonomian |
| 5 | Pembangunan Paving / Rabat Jalan Masuk Lapangan |
| 6 | Pembangunan drainase di bagian timur desa |
| 7 | Pemeliharaan rutin Drainase dan Trotoar di area pemukiman; |
| 8 | Pembersihan dan Pemeliharaan Jalan Kebun |
| 9 | Pembangunan sarana irigasi |
| 10 | Penerangan Lampu jalan |
| 11 | Papan Nama Jalan Desa (Monografi Desa) |
| 12 | Pembangunan Kantor dan BPU Desa |
| 13 | Pengadaan dan Pengelolaan sangar belajar Desa |

| | |
|--|--|
| 14 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini |
| 15 | Pengadaan gedung dan sarana Olahraga |
| 16 | Pembangunan Gapura Batas Desa |
| 17 | Pembangunan Talud Lapangan Desa ✓ |
| 18 | Pembangunan Jalan Paving Sebelah Selatan Desa |
| 19 | Pembangunan jembatan Kapaya-Rerengkem |
| 20 | Pembangunan Rabat Beton/Paving/Aspal jalan yang dirintis |
| 21 | Pembangunan Talud Di Jaga 1 ✓ |
| 22 | Pembangunan Talud Kompleks SD GP ✓ |
| 23 | Pembangunan Pos Kamling ditiap jaga |
| III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | |
| 1 | Kegiatan Pembinaan LPMD |
| 2 | Kegiatan Pembinaan PKK; |
| 3 | Kegiatan Pembinaan kepemudaan/ Karang Taruna |
| 4 | Pelatihan Paralegal Desa |
| 5 | Pelatihan Lembaga Desa |
| 6 | Kegiatan Pembinaan kerukunan umat antar gereja |
| IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| 1 | Peningkatan kapasitas aparatur desa ✓ |
| 2 | Bimtek Hukum Tua |
| 3 | Bimtek Perangkat Desa |
| 4 | Bimtek PKK |
| 5 | Bimtek BPD |
| 6 | Pelatihan Ketentraman dan Ketertiban(Linmas) ✓ |
| 7 | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; |
| 8 | Pelatihan Lembaga lembaga Desa ✓ |
| 9 | Pelatihan Kelompok Perempuan; ✓ |
| 10 | Pelatihan Kelompok tani; |
| 11 | Pelatihan Kelompok pemuda / Karang Taruna ✓ |
| 12 | Pelatihan Penyusunan Desain dan Rab ✓ |
| 13 | Pelatihan administrasi jaga |
| 14 | Pelatihan Stunting ✓ |
| 15 | Pelatihan Bumdes ✓ |
| 16 | Pelatihan kelompok Peternakan ✓ |
| 17 | BPJS Kesehatan |
| 18 | Klinik Pertanian |
| 19 | Pelatihan Management Desa |
| 20 | Pelatihan Kader Posyandu (kampung KB) |
| 21 | Media Informasi Keterbukaan Publik ✓ |
| 22 | Pelatihan Penyusunan RPJMDes |
| 23 | Pelatihan Komputer |

| | |
|----|-----------------------------|
| 24 | Pelatihan Administrasi Desa |
| 24 | Pelatihan Pengarsipan desa |

2. Prioritas

program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga.

Untuk prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar desa belum ada.

3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Diajukan melalui proposal dan melakukan pendekatan/ lobi ke Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

Pelaksana kegiatan Desa

Hukum Tua mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:

1. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
2. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hukum Tua mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Hukum Tua menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Hukum Tua, dan dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Hukum Tua dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan

BAB V P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan : WIAU LAPI

Pada Tanggal : 30 Sep 2019

HUKUM TUA

ALFRITS FREDDY ASENG, SP



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini Rabu, Tanggal dua puluh enam juli 2019 bertempat di Kantor hukum Tua Sementara telah diselenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 Desa Wiau Lapi yang dihadiri oleh Hukum Tua, Sekdes, BPD, LPM, Perangkat Desa, PKK, Karang Taruna, BAMAG, Poktan, Bumdes dan Tokoh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Usulan Pembangunan Yang Ada Di Desa Wiau Lapi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Johanis Rantung

dari Ketua BPD

Sekretaris/Notulen : Denny Worotitjan, SE

dari Sekretaris BPD

Narasumber :

1. Alfrits F. Aseng, SP

Hukum Tua

2. Victor Sumakul, Spd

Kasie. Prasarana & Fasilitas umum

3. Ir. Jolly Sumakul

Pendamping Desa.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Forum menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi **Keputusan Akhir dari Forum** yaitu :

- Pembahasan usulan utk perencanaan Pembangunan
- Pembentukan Tim penyusun dan verifikasi

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu seperti terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 26 - Juli 2019

Mengetahui,

Hukum Tua



ALFRITS F. ASENS, SP

Ketua BPD



JOHANNIS RANTUNG, SPD

Wakil Masyarakat

MAX MOKALU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
Sekretariat : Lantai 1 Kantor Desa Wiau Lapi Jaga 1

RISALAH RAPAT

- Hari/ Tanggal : Rabu, 26-juli 2019
Waktu Pelaksanaan : Jam 14.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Hukum Tua Desa Wiau Lapi
Materi Rapat : Pembahasan Perencanaan Pembangunan Desa Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2020
- Peserta Rapat : 1. BPD Wiau Lapi
2. Pemerintah Desa Wiau Lapi

Pokok Pembahasan :

- Usulan - usulan utlk Perenc. Pembangunan & Pemberdayaan.
 - Paving jalan Selatan
 - Talud di belakng rumah kel. Moku Wawitjan
 - Paving Jalan lingkaran
 - Talud di depan SD SP
 - Peningkatan jalan kebun Pops & lewet

- Pembentukan Tim Penyusun (7 orang).
 - Ketua
 - Sekr
 - Anggota

- Pembentukan Tim Verifikasi (3 org).

NOTULEN

- Usulan untuk Perencanaan Pembangunan

1. Paving Jalan Selatan
2. Gedung serba guna / olahraga
3. Pengadaan PAUD, SMP
4. Talud SD SP
5. Jalan kelung² / perbaiki
6. Beasiswa Si ke atas
7. Jembatan di Kapaya ke Perangkem
8. Talud di Belakang Kel. Mokatu Wodrotitan Jaga I
9. Paving Jalan Lingkar
10. Peningkatan Jalan Poopo
11. Jln Setapak Manonang
12. Jln Poopo Jembus Jln PMPN Jembus Jln Perangkem
13. Kelanjutan Jln Kelung
14. Trotoar dan Drainase
15. Bimtek Perangkat Desa ke Bali
16. Pengadaan Air Bersih Desa
17. Paving Jln / Halaman SD Inpres
18. Talud Desa dan SPDI
19. Peningkatan Jalan yg baru Pengerasan
20. Meratakan Lapangan
21. Pengadaan Mobil Ambulance
22. Pelatihan Masak Memasak
23. Kelanjutan Jln Lingkar Selatan
24. Pengadaan Mesin Pertanian headtraktor
25. Pelatihan Menjahit & Tata rias (BAMAE).
26. Pelatihan Administrasi Desa.

- Pembentukan Tim Purvisun 7 orang

- Pembentukan Tim Verifikasi 3 orang



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Sekretariat : Lantai 1 Kantor Desa Wiau Lapi Jaga 1

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
DALAM RAPAT

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP Thn 2020

DESA : WIAU LAPI
KECAMATAN : TARERAN
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
HARI/TANGGAL : *Rabu, 26 Juli 2019*

| NOMOR | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | JOHANIS RANTUNG, S.PD | KETUA | |
| 2. | | WAKIL KETUA | - |
| 3. | DENNY WOROTITJAN, SE | SEKRETARIS | |
| 4. | DEETJE MAUN, SPD | ANGGOTA | |
| 5. | MEYTI POSUMAH | ANGGOTA | |

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang
4. Quorum : Memenuhi Quorum

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WIAU LAPI



JOHANIS RANTUNG, SPD



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 26- Juli - 2019

Tempat : Kantor Hukum Tua

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------|----------------------|--------------|
| 1 | VICTOR SIMAKUL | Kasi SanjmaKec. | |
| 2 | Freddy Aseng. | Stuk Tua | |
| 3 | Joby Sumbakul | PD | |
| 4 | Johannis Rontung | Wet BPD | |
| 5 | Hendra Ktoenka | sekdes | |
| 6 | NOVI F.D ORCH | Kabie. Kesejahteraan | |
| 7. | Christin Lasut | Kabie Pelayanan | |
| 8. | Olha Sumbendap | Mawetung 1 & 2 | |
| 9 | Pauty poruma | SEC. BUMDES | |
| 10 | Decker Sumbakul | PALA 2 | |
| 11 | Jusuf Worotrijan | LPM | |
| 12 | Yetty Lontaan | LPM | |
| 13. | Diana Baik | SENBALA (emas) | |
| 14 | Refly Wurangian | kasie pemerintahan | |
| 15. | Jemy. Rutjap | Mawetung 1 | |
| 16 | Kirelat Prok | Pala 1 | |

PAGU INDIKATIF DESA

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

| No | Sumber Dana Indikatif | Sumber Dana Indikatif | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|--|------------------|
| | | Dana Desa (APBN) | Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota) | Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi | Bantuan keuangan |
| | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten |
| I | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 6,039,000 | 409,714,120 | - | - |
| 1 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat desa; | - | 298,476,720 | - | - |
| 2 | tunjangan hukum tua Dan Perangkat | - | 21,000,000 | - | - |
| 3 | tunjangan staf (Meweteng) | - | 36,000,000 | - | - |
| 4 | tunjangan BPD | - | 30,000,000 | - | - |
| 5 | kegiatan oprasional BPD | - | 2,000,000 | - | - |
| 6 | Honor operator Siskeudes | - | 1,200,000 | - | - |
| 7 | honor Linmas | - | 3,600,000 | - | - |
| 8 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa; | - | 2,023,000 | - | - |
| 9 | penyediaan benda pos | - | 310,000 | - | - |
| 10 | Perjalanan Dinas Pemdes | - | 6,250,000 | - | - |
| 11 | Percetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa (SILPA); | - | 1,000,000 | - | - |
| 12 | Penyediaan Makanan dan Minuman (SILPA); | - | 2,500,000 | - | - |
| 13 | Penyusunan RKPDes 2020 | 4,140,000 | - | - | - |
| 14 | Penyusunan Laporan keuangan (APBDes 2020) | 1,899,000 | - | - | - |
| 15 | operasional pemilihan hukum tua (SILPA) | - | 5,000,000 | - | - |
| 16 | Pajak Dan BBM Kendaraan Dinas | - | 354,400 | - | - |
| II | Pembangunan Desa | 593,642,000 | - | - | - |
| 1 | Pembangunan Talud Lapangan Desa | 174,419,000 | - | - | - |
| 2 | Paving Masuk Lapangan dan Paving jalan Selatan desa | 310,500,000 | - | - | - |
| 3 | Telford (SILPA) | 47,146,000 | - | - | - |
| 4 | Posyandu | 32,000,000 | - | - | - |
| 5 | Informasi Publik | 7,000,000 | - | - | - |
| 6 | Pelatihan Design Dan Rab | 10,862,000 | - | - | - |
| 7 | Pelatihan kader (Stunting) | 11,715,000 | - | - | - |



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Bidang Pembangunan Desa
 - a. Pelayanan dasar desa
 - b. Sarana Dan Prasarana Desa
 - c. Pengembangan Ekonomi local Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penanganan Keadaan Darurat
 - c. Penanganan Keadaan Mendesak

Uraian :

.....

.....

.....

.....

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2020

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tataran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

| No. | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
|----------|--|----------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Jlh (Rp) | Sumber | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | | | | | | | |
| 1 | Pendataan Penduduk | Desa | 1 keg. | masyarakat | Maret | 20,000,000 | ADD | Swakelola | Pokja |
| 2 | Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Maret | 20,000,000 | ADD | Swakelola | Pokja |
| 3 | Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan; | Jaga 1-4 | 1 keg. | masyarakat | Juli | 5,000,000 | ADD | Swakelola | Tim 7 |
| 4 | Kegiatan Musyawarah Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 2,000,000 | ADD | Swakelola | BPD |
| 5 | Kegiatan Musrenbangdes; | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 2,000,000 | ADD | Swakelola | Pendes |
| 6 | Penyusunan Reviu RPIJ dan RKP Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Desember | 2,000,000 | ADD | Swakelola | Pendes |
| 7 | Penyusunan APBDDesa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Desember | 3,000,000 | ADD | Swakelola | BPD & Pendes |
| 8 | Penyusunan Perubahan APBDDesa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 3,000,000 | ADD | Swakelola | BPD & Pendes |
| 9 | Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPU | Desa | 1 keg. | masyarakat | Januari | 3,000,000 | ADD | Swakelola | Pendes |
| 10 | Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 35,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 11 | sewa Kantor Desa | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 12 | Pemeliharaan Gedung kantor Desa | BPU | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | DD | Swakelola | PPKD |
| 13 | Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa | Kantor | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 14 | Kegiatan Operasional BPD; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | BPD |
| 15 | Kegiatan Operasional Jaga; | Jaga | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | KJ/Meweteng |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 1,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 17 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 2,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 18 | Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 2,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 19 | Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 20 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 2,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 21 | Penyediaan Makanan dan Minuman; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 22 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 235,200,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 23 | Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 150,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 24 | Tunjangan BPD | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 21,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 25 | Insentif Limmas | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 7,200,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 26 | Insentif Kader | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 6,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 27 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah; | Jakarta | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 40,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 28 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; | Amurang | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 25,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; | Desa | 1 set | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 30 | Pengadaan mebeleur; | Desa | 1 set | masyarakat | Juli | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 31 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; | Desa | 20 set | masyarakat | Juli | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 32 | Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga | Desa | 20 set | masyarakat | Juli | 12,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 33 | Pemilihan Hukum Tua | Desa | 1 | Masyarakat | Jan s/d Des | 40,000,000 | ADD | Swakelola | Pantia |
| 34 | Premi Asuransi | Desa | Tabun | masyarakat | Jan s/d Des | 3,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 35 | Operator Siskeudeas | Desa | Tabun | masyarakat | Jan s/d Des | 3,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 36 | Pengadaan Pakaian Olaraga | Desa | Tabun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 37 | Pengadaan pakaian linmas & Atribut | Desa | Tabun | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 38 | Pengadaan internet Desa | Desa | Tabun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 39 | Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa; | Desa | 1 set | masyarakat | Juli | 17,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | 1,313,400,000 | | | |
| II PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | |
| A. PELAYANAN DASAR DESA | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes | Desa | 1 unit | masyarakat | Juli | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 3 | pengembangan tenaga kesehatan Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 4 | pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 5 | pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 6 | pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 7 | pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 8 | pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 9 | pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 10 | Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 11 | Pengadaan Alat Olahraga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 12 | Pengadaan Gedung olahraga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 13 | Pelatihan Stunting | Desa | 2 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 14 | fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| B. SARANA DAN PRASARANA DESA | | | | | | | | | |
| 1 | Paving / Rabat jalan dalam lapangan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 400,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Pembangunan Talud Lapangan Desa | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 400,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 3 | Paving jalan Selatan desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 600,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 4 | Pembangunan jembatan jalan kapaya ke rerengkem | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 5 | Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 6 | Rabat beton jalan yang sudah dirintis (Jln Baru Timur Desa) | Desa | 2 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 7 | Kelanjutan jalan kuntung | Desa | 3 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 8 | Talud dibelakang rumah kel mokalu worotijan | Desa | 4 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 9 | Pembangunan talud dikompleks Sd GP | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 10 | Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet | kebun | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 11 | Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem | kebun | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 12 | Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP | Kebun | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 13 | Pembangunan Saluran Irigasi ayamen | Kebun | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 14 | Pembangunan Talud dan Drainase di Timur Kampung sampai di sawah Ayamen | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 15 | Pembangunan Talud dan Drainase dan jalan bagian Timur Desa menuju Desa Lansot | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 6 | Pembangunan / Perkerasan rabat beton / Paving jalan lingkak Lapangan Olah Raga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 17 | Perintisan danPembangunan Jalan bagian Utara | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 125,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 18 | Pembangunan peningkatan jalan (Paving Blok) Jalan Desa Bagian Selatan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 350,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 19 | Renovasi Saluran Parit dan Trotoar Dalam Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 20 | fasilitas penerangan jalan; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 21 | Pemeliharaan rutin Drainase di area pemukiman; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 22 | Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah dan Pos Keamanan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 23 | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 24 | Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 25 | Pembangunan Kantor dan Gedung Serba guna Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | April | 90,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 26 | Pembangunan jalan dalam TPU | Desa | 1 keg. | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 27 | Pembangunan Irigasi | Desa | 1 keg. | masyarakat | April | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 28 | Pengadaan dan Pembangunan SMP | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 29 | Pengadaan PAUD | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 30 | Papan Nama Jalan (Rupa Bumi) | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 31 | Pembangunan dan Pengadaan MCK | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 32 | Pembangunan Bendungan dan saluran irigasi | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 33 | Pembuatan jalan setapak manomang lewet | Kebun | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 34 | Perbaikan Jalan kulong - kulong | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 35 | Perintisan jalan popo | Kebun | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 36 | Pembuatan talud dijaga I belakang kel. Mokalw worotijan | desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 37 | Paving jln / halaman sd impres | desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 38 | Pembangunan talud ditempat umum | desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 39 | Pengadaan Air bersih desa | desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 40 | Pengadaan ALSINTAN | desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 1,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 41 | Pembangunan Gapura batas wilayah Desa | desa | 1 Keg | masyarakat | Jan s/d Des | 300,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 42 | Pembangunan Pos Kambing di tiap jaga | desa | 1 Keg | masyarakat | Jan s/d Des | 300,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 41 | Paving Block jalan dalam desa sebelah utara dan selatan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| C. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA | | | | | | | | | |
| 1 | pembangunan dan pengelolaan pasar Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 1,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 2 | pengembangan usaha mikro berbasis Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 3 | pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 4 | pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 5 | pembangunan dan pengelolaan lumpung pangan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 6 | penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 7 | penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpadu; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| 8 | pengembangan benih lokal; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 9 | pengembangan ternak secara Umum; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 10 | pengembangan dan pengelolaan energi mandiri; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 11 | Pencambahan modal BUMDES | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 12 | pengembangan TTTG pengolahan hasil pertanian/perikanan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | 18,165,000,000 | | | |
| III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Pembinaan PKK; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juni | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 2 | Kegiatan Pembinaan kepemudaan; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juni | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 3 | Pembinaan kerukunan umat beragama | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 4 | Pengadaan sarana dan prasarana olah raga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 100,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 5 | Pelatihan Paralegal Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 6 | Pelatihan Lembaga Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | DD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 7 | Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 8 | Pelatihan Administrasi Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | DD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 9 | Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | 245,000,000 | | | |
| IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 1 | Pelatihan manajemen usaha | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 2 | Pelatihan pengolahan hasil pertanian; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 3 | Pelatihan teknologi pertanian berbasis organik | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 4 | Pengenalan TTG pada Masyarakat; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 5 | Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 6 | Peningkatan kapasitas aparaturnya desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 7 | Pelatihan Keamanan Dan Keterliban | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 8 | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 9 | Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 10 | Pelatihan Kelompok Perempuan; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 11 | Pelatihan Peternakan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 12 | Pelatihan Kelompok tani; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 13 | BPJS Kesehatan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | ADD | Swakelola | Pemdes |
| 14 | Klinik Pertanian | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 15 | Pelatihan kader Posyandu | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 16 | Makanan Tambahan Balita | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 17 | Pelatihan Bimtek Kase Dan Kaur | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 18 | Pengadaan Tutor PAUD | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 19 | BIMTEK BPD | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Panitia |
| 20 | Pelatihan Penyusunan RPJMDes | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | pemdes |
| 21 | Pelatihan komputer | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | pemdes |
| 22 | Intensif kader | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------|------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| 23 | Pelatihan administrasi jaga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 24 | Pelatihan penyusunan desain & Rab | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 25 | Bimtek Hukum Tua | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 26 | Bimtek PKK | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 27 | Bimtek Perangkat desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 225,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 28 | pelatihan BUMDES | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 29 | Pelatihan Stunting | Desa | 1 keg. | Masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 30 | Pelatihan pengarsipan Desa | Desa | 1 keg. | Masyarakat | Jan s/d Des | 21,250,000 | Dana Desa | Swakelola | Pendes |
| 31 | Pelatihan Administrasi Desa | Desa | 1 keg. | Masyarakat | Jan s/d Des | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pendes |
| 32 | Pelatihan Kelompok pemuda; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | 966,250,000 | | | |
| V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | |
| a | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan pembuatan talud Sd GP | Desa | 1 Keg | masyarakat | Jan s/d Des | 1,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Kegiatan penanggulangan Bencana | Desa | 1 Keg | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| b | Penanganan Keadaan Darurat | | | | | | | | |
| 1 | Penanganan keadaan Darurat | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| c | Penanganan keadaan mendesak | | | | | | | | |
| 1 | Penanganan keadaan Mendesak | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | 1,100,000,000 | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 21,789,650,000 | | | |



Wiau Lapi, 30 September 2019
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 Hendra S. Mokalu

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2020

Desa : Wiau Lapi
 Kecamatan : Tareran
 Kabupaten : Minahasa Selatan
 Provinsi : Sulawesi Utara

| No. | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
|----------|--|----------|---------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------------------|
| | | | | | | Jlh (Rp) | Sumber | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| 1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | | | | | | | |
| 1 | Pendataan Penduduk | Desa | 1 keg. | masyarakat | Maret | 20,000,000 | ADD | Swakelola | Pokja |
| 2 | Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Maret | 20,000,000 | ADD | Swakelola | Pokja |
| 3 | Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalan Gagasan; | Jaga 1-4 | 1 keg. | masyarakat | Juli | 5,000,000 | ADD | Swakelola | Tim 7 |
| 4 | Kegiatan Musyawarah Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 2,000,000 | ADD | Swakelola | BPD |
| 5 | Kegiatan Musrenbangdes; | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 2,000,000 | ADD | Swakelola | Pendes |
| 6 | Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Desember | 2,000,000 | ADD | Swakelola | Pendes |
| 7 | Penyusunan APBDDesa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Desember | 3,000,000 | ADD | Swakelola | BPD & Pendes |
| 8 | Penyusunan Perubahan APBDDesa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 3,000,000 | ADD | Swakelola | BPD & Pendes |
| 9 | Penyusunan Laporan APBDDes. LPPD dan LKPJ | Desa | 1 keg. | masyarakat | Januari | 3,000,000 | ADD | Swakelola | Pendes |
| 10 | Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 35,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 11 | sewa Kantor Desa | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 12 | Pemeliharaan Gedung kantor Desa | BPU | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | DD | Swakelola | PPKD |
| 13 | Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa | Kantor | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 14 | Kegiatan Operasional BPD; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | BPD |
| 15 | Kegiatan Operasional Jaga; | Jaga | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | KJ/Meweteng |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 1,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 17 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 2,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 18 | Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 2,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 19 | Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 20 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 2,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 21 | Penyediaan Makanan dan Minuman; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 22 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa; | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 235,200,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 23 | Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 150,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 24 | Tunjangan BPD | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 21,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 25 | Insentif Linmas | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 7,200,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 26 | Insentif Kader | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 6,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 27 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah; | Jakarta | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 40,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 28 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; | Amurang | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 25,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------|------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; | Desa | 1 set | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 30 | Pengadaan mebelur; | Desa | 1 set | masyarakat | Juli | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 31 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; | Desa | 20 set | masyarakat | Juli | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 32 | Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik, pakaian Olah Raga | Desa | 20 set | masyarakat | Juli | 12,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 33 | Pemilihan Hukum Tua | Desa | 1 Tahun | Masyarakat | Jan s/d Des | 40,000,000 | ADD | Swakelola | Paritia |
| 34 | Premi Asuransi | Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 3,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 35 | Operator Siskudeas | Desa | 1 Tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 3,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 36 | Pengadaan Pakaian Olahraga | Desa | 1 Tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 37 | Pengadaan pakaian Immas & Atribut | Desa | 1 Tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 38 | Pengadaan internet Desa | Desa | 1 Tahun | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| 39 | Pemeliharaan kendaraan Oprasional Desa; | Desa | 1 set | masyarakat | Juli | 17,500,000 | ADD | Swakelola | PPKD |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | 1,313,400,000 | | | |
| II PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | |
| A. PELAYANAN DASAR DESA | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes | Desa | 1 unit | masyarakat | Juli | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 3 | Pengembangan tenaga kesehatan Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 4 | pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 5 | pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 6 | pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 7 | pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 8 | pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 9 | pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 10 | Pengadaan dan pemertan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 11 | Pengadaan Alat Olahraga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 12 | Pengadaan Gedung olahraga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 13 | Pelatihan Stunting | Desa | 2 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 14 | fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| B. SARANA DAN PRASARANA DESA | | | | | | | | | |
| 1 | Paving / Rabat jalan dalam lapangan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 400,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Pembangunan Talud Lapangan Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 400,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 3 | Paving jalan Selatan desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 600,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 4 | Pembangunan jembatan jalan kapaya ke reterengem | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 5 | Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 6 | Rabat beton jalan yang sudah dirintis (Jln Baru Timur Desa) | Desa | 2 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 7 | Kelanjutan jalan kuntung | Desa | 3 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 8 | Talud dibelakang rumah kel mokalu worotigan | Desa | 4 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 9 | Pembangunan talud dikompleks Sd GP | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 450,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 10 | Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet | kebun | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 11 | Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Reterengem | kebun | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 12 | Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP | kebun | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 13 | Pembangunan Saluran Irigasi ayamen | kebun | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 14 | Pembangunan Talud dan Drainase di Timur Kampung sampai di sawah Ayamen | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 15 | Pembangunan Talud dan Drainase dan jalan bagian Timur Desa menuju Desa Lansot | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 6 | Pembangunan / Perkerasan rabat beton / Paving jalan lingkak Lapangan Olah Raga | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 17 | Perintisan danPembangunan Jalan bagian Utara | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 125,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 18 | Pembangunan peningkatan jalan (Paving Blok) Jalan Desa Bagian Selatan | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 350,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 19 | Renovasi Saluran Parit dan Trotoar Dalam Desa | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 20 | Facilitas penertangan jalan: | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 21 | Pemeliharaan ruin Drainase di area pemukiman; | Desa | 1 keg | masyarakat | Apr s/d Nov | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 22 | Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah dan Pos Keamanan Desa | Desa | 1 keg | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 23 | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa: | Desa | 1 keg | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 24 | Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa: | Desa | 1 keg | masyarakat | April | 90,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 25 | Pembangunan Kantor dan Gedung Serba guna Desa | Desa | 1 keg | masyarakat | April | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 26 | Pembangunan jalan dalam TPU | Desa | 1 keg | masyarakat | April | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 27 | Pembangunan Irigasi | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 28 | Pengadaan dan Pembangunan SMP | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 29 | Pengadaan PAUD | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 30 | Papan Nama Jalan (Rupa Bumi) | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 31 | Pembangunan dan Pengadaan MCK | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 5,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 32 | Pembangunan Bendungan dan saluran irigasi | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 250,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 33 | Pembuatan jalan setapak manorang lewet | Kebun | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 34 | Perbaikan Jalan kulong - kulong | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 35 | Perintisan jalan popo | Kebun | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 36 | Pembuatan talud dijaga l belakang kel Mokalu worotijan | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 37 | Paving jln / halaman sd Inpres | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 38 | Pembangunan talud ditempat umum | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 39 | Pengadaan Air bersih desa | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 40 | Pengadaan ALSINTAN | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 300,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 41 | Pembangunan Gapura batas wilayah Desa | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 300,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 42 | Pembangunan Pos Kambling di tiap jaga | desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 41 | Paving Block jalan dalam desa sebelah utara dan selatan | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 500,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| C. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA | | | | | | | | | |
| 1 | pembangunan dan pengelolaan pasar Desa | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 1,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 2 | pengembangan usaha mikro berbasis Desa: | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 3 | pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa: | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 4 | pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 5 | pembangunan dan pengelolaan jumbung pangan | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 6 | peretapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 7 | perangulangan hama/ penyakit pertanian/ perikanan/ Vaksinasi Ternak secara terpadu: | Desa | 1 keg | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 8 | pengembangan benih lokal; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 9 | pengembangan ternak secara Umum; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 10 | pengembangan dan pengelolaan energi mandiri; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 11 | Peneambahan modal BUMDES | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| 12 | pengembangan TTTG pengolahan hasil pertanian/perikanan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
| III PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | | | Jumlah Per Bidang 2 | 18,165,000,000 | | |
| 1 | Kegiatan Pembinaan PKK; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juni | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 2 | Kegiatan Pembinaan kepemudaan; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juni | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 3 | Pembinaan kerukunan umat beragama | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 15,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 4 | Pengadaan sarana dan prasarana olah raga | Desa | 1 keg. | masyarakat | Apr s/d Nov | 100,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 5 | Pelatihan Paralegal Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 6 | Pelatihan Lembaga Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | DD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 7 | Penyelenggaraan kerentraman dan ketertiban | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 8 | Pelatihan Administrasi Desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | DD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 9 | Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat | Desa | 1 keg. | masyarakat | September | 20,000,000 | ADD | Swakelola | PPKD & Panitia |
| IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | Jumlah Per Bidang 3 | 245,000,000 | | |
| 1 | Pelatihan manajemen usaha | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 2 | Pelatihan pengolahan hasil pertanian; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 3 | Pelatihan teknologi pertanian berbasis organik | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 4 | Pengenalan TTG pada Masyarakat; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 5 | Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 6 | Peningkatan kapasitas aparatur desa | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 7 | Pelatihan Keamanan Dan Ketertiban | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 8 | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Mei | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 9 | Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 10 | Pelatihan Kelompok Perempuan; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 11 | Pelatihan Peternakan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 12 | Pelatihan Kelompok tani; | Desa | 1 keg. | masyarakat | Juli | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 13 | BPJS Kesehatan | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | ADD | Swakelola | Pemdes |
| 14 | Klinik Pertanian | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 150,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 15 | Pelatihan kader Posyandu | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 16 | Makanan Tambahan Balita | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 17 | Pelatihan Bimtek Kasie Dan Kaur | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 18 | Pengadaan Tutor PAUD | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 10,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 19 | BIMTEK BPD | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 100,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Panitia |
| 20 | Pelatihan Penyusunan RPJMDes | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | pemdes |
| 21 | Pelatihan komputer | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | pemdes |
| 22 | Intensif kader | Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| 23 | Pelatihan administrasi jaga | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 24 | Pelatihan penyusunan desain & Rab | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 25 | Bimtek Hukum Tua | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 26 | Bimtek PKK | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 27 | Bimtek Perangkat desa | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 225,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 28 | pelatihan BUMDES | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 29 | Pelatihan Stunting | Desa | 1 keg. | Mayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 30 | Pelatihan pengarsipan Desa | Desa | 1 keg. | Mayarakat | Jan s/d Des | 21,250,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 31 | Pelatihan Administrasi Desa | Desa | 1 keg. | Mayarakat | Jan s/d Des | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
| 32 | Pelatihan Kelompok pemuda; | Desa | 1 keg. | mayarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | 966,250,000 | | | |
| V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | |
| a | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan penanggulangan Bencana | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Kegiatan Pembuatan Talud SD GP | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 1,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| b | Penanganan Keadaan Darurat | | | | | | | | |
| 1 | Penanganan keadaan Darurat | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| c | Penanganan keadaan mendesak | | | | | | | | |
| 1 | Penanganan keadaan Mendesak | Desa | 1 keg. | mayarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | 20,000,000 | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 20,709,650,000 | | | |



Wiauw Lapi, 27 September 2019
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Hendra S. Mokatu

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|
| 23 | Pelatihan administrasi jaja | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 24 | Pelatihan penyusunan desain & Rab | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 25 | Bimtek Hukum Tua | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 26 | Bimtek PKK | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 27 | Bimtek Perangkat desa | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 225,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 28 | pelatihan BUMDES | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 29 | Pelatihan Stunting | Desa | 1 keg | Maayarakat | Jan s/d Des | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| 30 | Pelatihan pengarsipan Desa | Desa | 1 keg | Maayarakat | Jan s/d Des | 21,250,000 | Dana Desa | Swakelola | Pendes |
| 31 | Pelatihan Administrasi Desa | Desa | 1 keg | Maayarakat | Jan s/d Des | 25,000,000 | Dana Desa | Swakelola | Pendes |
| 32 | Pelatihan Kelompok pemuda; | Desa | 1 keg | maayarakat | Agustus | 15,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | 966,250,000 | | | |
| V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | |
| a Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan penanggulangan Bencana | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 20,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Kegiatan Pembuatan Talud SD GP | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 1,000,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| b Penanganan Keadaan Darurat | | | | | | | | | |
| 1 | Penanganan keadaan Darurat (COVID - 19) | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 30,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| c Penanganan keadaan mendesak | | | | | | | | | |
| 1 | Penanganan keadaan Mendesak | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 50,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| 2 | Belanja tidak terduga | Desa | 1 keg | maayarakat | Jan s/d Des | 400,000,000 | Dana Desa | Swakelola | PPKD |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | 1,500,000,000 | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | 22,189,650,000 | | | |



Wiau Lapi, 27 September 2019
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(Signature)
Hendra S. Mokatlu



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Agustus - 2019

Tempat : Kantor Hukum Tua

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | VICTOR SUMAKUL | Kasi Sepras Kec. | |
| 2 | Freddy Seung | Hukum Tua | |
| 3 | Joly Sumakul | PP | |
| 4 | Johannis Rantung ssa | kef. BPO | |
| 5 | Handan Motaku | Sekdes | |
| 6 | Novi F-D ORCH | Kasie Kesejahteraan | |
| 7 | Christin Lasub | Kasie Pelayanan | |
| 8 | Olha Sumendap | Meneteng & I2 | |
| 9 | Santy Posuma | Sek. BUMDES | |
| 10 | Decker Sumakul | PAL4 2 | |
| 11 | Juwat Worotitjan | LPM | |
| 12 | Yetty Rontaan | LPM | |
| 13 | Diana Palik | GEMBALA (BAMAG) | |
| 14 | Refly Wurangian | Kasie pemerintah | |
| 15 | Jerry Rintjerp | Menetery I | |
| 16 | Niclas PROK | Pala I | |



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

BERITA ACARA
TENTANG HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN
RKP TAHUN 2020 DESA WIAU LAPI

Berkaitan Dengan Pelaksanaan Musyawarah RKP Desa Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Kamis, 8 - Agustus 2019
J a m : 14.00.....s/d selesai
Tempat : Kantor desa Wiau lapi

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh TIM penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Melakukan pengkajian keadaan Desa;
3. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa mengikuti regulasi aturan yang baru; dan
4. penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana daftar terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 8 Agustus 2019

Mengetahui,

Hukum Tua



ALERITS F. ASENS, SP

KetuaTim Penyusun RKP Desa

HENDRA MOKALU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAP I

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 25 September 2019
 J a m : 13.00 WITA - Selesai
 Tempat : Kantor Hukum Tua Desa Wiau Lapi

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi Pembahasan

- *Petioritas Pembangunan Desa Thn 2020.*

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
 Sekretaris/Notulen: dari
 Narasumber : 1. *VICTOR SUMAKUL SPD* dari *Kecamatan Tareran*
 2. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi **Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa** dalam rangka PENYUSUNAN Rancangan RKP Desa yaitu : *Pelaksanaan Pembangunan fisik :*

- *Sarana Olah-raga*
- *Paving Jalan Selatan*
- *Jembatan 1 Borong 2 Kapaja 1 Rereng kem*
- *Peningkatan Jalan Selatan yg baru diintis (Telford)*
- *Perin zisan Jalan Rereng kem, Selatan, Popo, Manonang*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD,



Johanis Z. Rantung, SPd

Wiau Lapi, September 2019

HUKUM TUA,



Alfrits F. Aseng, SP



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPi

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH

HARI/TGL. : Rabu, 25 September 2019
 TEMPAT ; Kantor Hukum Tua Desa Wiau Lapi

| No | NAMA | ALAMAT | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1. | Jeddy Agung | wiau Lapi | Hukum Tua | |
| 2 | Johani Rantung | wiau Lapi | lut BPD | |
| 3 | Hendon Ktokaku | wiau Lapi | Seledes | |
| 4 | JEME MAMHOREY | wiau Lapi | KARU TU | |
| 5 | Yerikson K. Worangian | Lansot Timur | KASIE KECAMATAN | |
| 6. | Dames Kematu | Pimmorongon | Plh. Kasie Pelayanan | |
| 7. | Deborz Timbel | R. Atas | Staf Kecamatan | |
| 8. | Erny Lenglong | wumu | PLD | |
| 9 | Denny Worotijun | wiau Lapi | Sehr. BPD | |
| 10 | Dty Smarkul | Lansot | PDP | |
| 11 | Stewie Koagowu | Mauada | PDP | |
| 12 | Deetje Mauu | wiau Lapi | Angg. BPD | |
| 13. | Meity posuma. | wiau. Lapi | Angg. BPD. | |
| 14. | Christin Lasub | - - - | Kasie Pelayanan | |
| 15. | Yeanne Rompas | JG I wiau | PDTI | |
| 16. | MEITY MAKI | SULUW 3 | PLD | |
| 17. | Max Sorutan | Wiau Lapi | PADA III | |
| 18 | Fenny N. Oroh | - - - | Kasie Kesejahteraan | |
| 19. | Verke Tambun | w- Lapi | TP. PKK | |
| 20. | Olga Semendap | Jg II W. Lapi | menyandang | |
| 21. | Sandy Winereungan | Jg I. | TP. PKK | |
| 22 | Melca PROX | W. Lapi | Pada I | |
| 23 | Max Mokaku | - - - | Tomas | |
| 24. | Jurind mauru | B. Lapi | Lpru | |
| 25 | Reffy worangian | wiau Lapi | Kasie pemerintahan | |
| 26 | Jusuf Worotijun | JG I | LPM | |
| 27 | YONAN HONDOY | JG I | Tomas | |
| 28. | Pdt. Diana Palik | JAGA III | GEMBALA | |
| 29 | Max Karunding | F. Masyarakat | T. Masyarakat | |



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPU

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RKP DESA TAHUN 2020

Dalam rangka penyusunan Rancangan RKP Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Tahun 2020, maka pada :

Hari / Tanggal : *Jumat, 27-sept* 2019
J a m : *10.00* WITA s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Wiau lapi

Telah diselenggarakan rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa, yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Tareran, wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2020

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : JOHANIS Z. RANTUNG, SPD (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : DENNY WOROTITJAN, SE (Sekretaris BPD)
Narasumber : 1. YERIKSON WURANGIAN, SE (Kasie Pemberdayaan Perangkat Desa)
2. ALFRITS F, \. ASENG, SP (Hukum Tua)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya BPD dan Pemerintah Desa memutuskan dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2020 menjadi

Peraturan Desa seperti terlampir dalam Berita Acara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

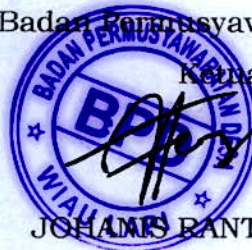
Wiau lapi, 27 September 2019



Hukum Tua

ALFRITS F. ASENS, SP

Badan Permusyawaratan Desa



Ketua

JOHANNIS RANTUNG, SPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR *06* TAHUN 2019
TENTANG RKPDes WIAU LAPI TAHUN 2020

Pada hari Rabu bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan belas, bertempat di Kantor Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Wiau Lapi dalam rangka membahas RKP Desa .

Rapat Badan Permasyarakatan Desa Pakuure Tiga Dihadiri Oleh Seluruh Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sebagaimana daftar terlampir. Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan, dengan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Rincian prioritas RKPDes
3. Prioritas RKPDes akan dibiayai dalam APBDes.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau Lapi, 27 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

JOHANIS RANTUNG, SPD



SEKRETARIS

DENNY WOROTITJAN, SE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAP I
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : 27- September 2019
Waktu Pelaksanaan : Jam 10.00s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Wiau Lapi
Materi Rapat : Pembahasan Tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2020 Menjadi Peraturan Desa Wiau lapi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2020
Peserta Rapat : 1. BPD Wiau Lapi
2. Pemerintah Desa Wiau Lapi

I S I

I. Pembahasan

1. Rancangan RKP Desa Tahun 2020

II. Kesimpulan

Melalui pembahasan antara BPD dan Pemerintah Desa dapat disimpulkan bahwa :

1. Seluruh anggota BPD menerima Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDesa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang RKPDesa, dengan beberapa catatan sebagai berikut :
 - Untuk proses penyusunan Rancangan APBDesa, diharapkan Pemerintah Desa lebih memperhatikan lagi prioritas pembangunan selain infrastruktur umum juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
 - Setelah ditetapkan, segera dimasukkan ke BPMPD untuk dilakukan pemeriksaan agar dapat diundangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.
 - Pemerintah Desa wajib membuat Informasi Perdes RKPDes kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan.

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

JOHANIS Z. RANTUNG,SPD

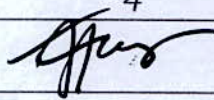


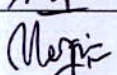


Sekretaris

DENNY WOROTITJAN, SE

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
DALAM RAPAT PEMBAHASAN TERHADAP PENGAJUAN
RANCANGAN RKP DESA
NOMOR TAHUN 2019

DESA : WIAU LAPI
KECAMATAN : TARERAN
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
HARI/TANGGAL : 27, September 2019

| NOMOR | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-------|-------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | JOHANIS Z. RANTUNG, SPD | KETUA |  |
| 2. | | WAKIL KETUA | |
| 3. | DENNY WOROTITJAN, SE | SEKRETARIS |  |
| 4. | DEETJE MAUN, SPD | ANGGOTA |  |
| 5. | MEYTI POSUMAH | ANGGOTA |  |

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 4 orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang
4. Quorum : Memenuhi Quorum

Wiau Lapi, 27 - September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



JOHANIS RANTUNG, SPD



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 27-September - 2019
Tempat : Kantor Hukum Tua

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | VICTOR SUMAKUL | Kasi Seipmas Kec. | |
| 2 | Freddy Aeeng | Hukum Tua | |
| 3 | Goly Sumakul | PP | |
| 4 | Johannis Rantung ssa | kef. BPD | |
| 5 | Hendon Makala | Sekretes | |
| 6 | Novi F-D ORCH | Kasie Kesejahteraan | |
| 7 | Christin Lasut | Kasie Pelayanan | |
| 8 | Elha Sumendap | Meweteng Sj 12 | |
| 9 | Sauty Posuma | Sek. BUMDES | |
| 10 | Decker Sumakul | PALKA 2 | |
| 11 | Juwat Worotstjan | LPM | |
| 12 | Yetty Kontaan | LPM | |
| 13 | Diana Palik | GEMBALA (BAMAG) | |
| 14 | Reffy Wurangian | Kasie pemerintah | |
| 15 | Jerry Pintjerp | Meweteng I | |
| 16 | Niclas PROK | Pala I | |



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2019

T E N T A N G

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA WIAU LAPI
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan baik skala menengah desa dan atau skala tahunan.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada perencanaan prioritas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tentang Desa.
 4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Prioritas pembangunan desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Perencanaan Kerja Pemerintah Desa.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 Desa Wiau lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- KEDUA : RKP Diprioritasnya dianggarkan untuk di biyai dalam APBDes.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

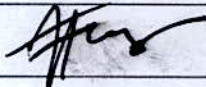

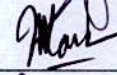
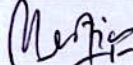
Ditetapkan : di Wiau Lapi
Pada tanggal : 27 September 2019

KETUA BPD

JOHANIS RANTUNG, SPD

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
DALAM RAPAT PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2019

DESA : WIAU LAPI
KECAMATAN : TARERAN
KABUPATEN : MINAHASA SELATAN
HARI/TANGGAL : 27-September 2019

| NOMOR | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-------|-------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | JOHANIS Z. RANTUNG, SPD | KETUA |  |
| 2. | | WAKIL KETUA | |
| 3. | DENNY WOROTITJAN, SE | SEKRETARIS |  |
| 4. | DEETJE MAUN, SPD | ANGGOTA |  |
| 5. | MEYTI POSUMAH | ANGGOTA |  |

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang
4. Quorum : Memenuhi Quorum

Wiau Lapi, 27 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



JOHANIS RANTUNG, SPD



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI
NOMOR **15** TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2020

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa akan melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan Perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa, sehingga perlu menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. bahwa anggota tim penyusun perubahan RPJM Desa dan RKP Desa terdiri Hukum Tua selaku pembina, sekretaris Desa selaku ketua, Kepala Urusan Perencanaan selaku sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya, dengan jumlah tim 7 (tujuh) orang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penetapan Tim Penyusun Reviu RKP Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan RKP Desa tahun 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun RKP Desa bertanggung jawab kepada Hukum Tua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa Wiau lapi tahun 2020.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau lapi

Pada tanggal : 27 Juli 2019



Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa Wiau lapi
Tentang : Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 27 Juli 2019

| No | Nama | Jabatan/Unsur dari | Kedudukan TIM |
|----|-------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Hendra S. Mokalau | Sekretaris Desa | Ketua |
| 2. | Joen Rawung | Kaur Perencanaan | Sekretaris |
| 3. | Jene Manengkey | Kaur TU & UMUM | Anggota |
| 4. | Novi Oroh | Kasie Kesejahteraan | Anggota |
| 5. | Johan kondoj | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 6. | Jusuf Worotitjan | LPMD | Anggota |
| 7. | Sandy Winerungan | Kader Desa | Anggota |

HUKUM TUA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
HUKUM TUA
WIAU LAPU
71.05.01.2019
ALFRITS F. ASSENG, SP
KECAMATAN TUBERAN

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

